

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2021 pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Purwakarta**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor: PW.02.02/331/Insp-IrbanIV/2022

Tanggal: 16 Maret 2022

...meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkatkan karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak), dilakukan dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai dari bobot 11,25 (Sebelas koma dua lima) dari nilai yang ditetapkan dengan nilai 12,50 (Dua belas koma lima nol) (kriteria terpenuhi 100 %) dengan gradasi nilai A, hal tersebut dapat terlihat dari :

- Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti
- Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.
- Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
- Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja
- Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta beserta Jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi yang dikembangkan terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja serta memperbaiki kelemahan atas evaluasi tersebut. antara lain :

1. Setiap unit/satuan kerja belum merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
2. Belum Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. berupa Bukti tindak lanjut hasil monev Rencana Aksi

3. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
4. Dokumen Laporan Kinerja belum direviu
5. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
6. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.
8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Terkait kelemahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di atas, kami merekomendasikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut di atas.